

TA 2020



# Rencana Kerja

Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar

# Bab I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan hidup Tahun 2019, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Lingkungan Hidup yang telah disiapkan satu tahun sebelumnya adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja SKPD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansi penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2020.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

## 1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Renja SKPD adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- 7) Permendagri No. 18 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017.
- 8) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan
- 9) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
- 10) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 30);
- 11) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat
- 12) Pergub Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun berjalan (2019) dan untuk memaksimalkan pemanfaatan anggaran sehingga dana APBD yang teralokasikan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2020 ini dapat terserap secara optimal untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan baik di dalam dokumen RPJMD maupun di dalam dokumen renstra.

Sedang tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (Renja) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD (KUA-PPAS APBD) Tahun 2019 .

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dan garis besar Renja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 sebagai berikut :

1. Bab I PENDAHULUAN
  - a. Latar Belakang
  - b. Landasan Hukum
  - c. Maksud dan Tujuan
  - d. Sistematika Penulisan
2. Bab II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
  - a. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
  - b. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
  - c. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
  - d. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
  - e. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat
3. Bab III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
  - a. Telaahan terhadap kebijakan nasional
  - b. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
4. Bab. IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
5. BAB IV PENUTUP

## BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dalam mengevaluasi pelaksanaan seluruh program Lingkungan Hidup, dapat dilihat melalui tercapainya indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan dan memberikan gambaran peranan lingkungan hidup terhadap prioritas pembangunan daerah, sehingga upaya untuk mendorong keterkaitan antara program terus dilaksanakan, dimana keberhasilan satu program akan meningkatkan keberhasilan program lainnya, dan sebaliknya kegagalan salah satu program juga akan menurunkan capaian keberhasilan program lainnya. Dengan demikian sinergitas dalam pelaksanaan kegiatan sangat diperlukan dalam mendukung keberhasilan pembangunan lingkungan hidup.

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat merupakan organisasi perangkat daerah yang mengalami perubahan nomenklatur dari Bapedalda Prov. Sumatera Barat pada akhir tahun 2016. Untuk pelaksanaan evaluasi renja, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sudah menggunakan renstra tahun 2017-2021 namun untuk realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d Tahun (n-3) masih menggunakan renstra Bapedalda 2016-2021.

DLH Prov. Sumbar pada tahun 2018 memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 17.535.341.475 dengan rincian dan realisasi terlihat seperti tabel berikut :

Tabel 2.1 Pagu dan Realisasi Tahun 2018

No	Jenis Belanja	Pagu Dana Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Persentase (%)	Realisasi Fisik (%)	Sisa Dana (Rp)
1	Belanja Tidak Langsung	5.429.761.408	5.194.071.303	95,66	100	235.690.105
2	Belanja Langsung	12.105.580.067	11.723.670.296	96,85	100	381.909.771
a.	BL Pokok	3.605.252.498	3.536.165.465	98,08	100	69.087.033
b.	BL Kegiatan	8.500.327.569	8.187.504.831	96,32	100	312.822.738
	TOTAL	17.535.341.475	16.917.741.599	96,49	100	617.599.876

DLH prov. Sumbar pada tahun 2018 telah melaksanakan 5 (lima) program utama yang tercantum dalam penetapan Kinerja. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD DLH tahun 2018 dapat dijelaskan secara ringkas sebagai berikut:

- a. Sampai dengan akhir tahun 2018, dari 10 program dan 59 kegiatan yang dilaksanakan oleh DLH semua realisasi fisiknya mencapai 100% dan realisasi anggaran sebesar 96,85%. Realisasi fisik kegiatan yang mencapai 100% ini merupakan hasil dari upaya seluruh aparatur Dinas LH Provinsi Sumatera Barat yang dengan komitmen tinggi melaksanakan seluruh kegiatan seefektif dan seefisien mungkin

- b. Hasil evaluasi capaian pelaksanaan Renja OPD DLH tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut:

**Tabel. 2.2**  
**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2019**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2017-2021	Realisasi Target Kinerja hasil program dan kegiatan s/d Tahun 2017 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2018 (tahun n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2019)			
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 (tahun n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2020 (tahun berjalan /tahun n-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)		
	<b>Lingkungan Hidup</b>											
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase pelayanan administrasi perkantoran</b>										
	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Materai, paket pengiriman surat dan BBM yang disediakan	60	bulan	12	bulan	12	bulan	100%	12	36	60%
	Penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	Pembayaran rekening listrik, telepon, air, faximile, internet	60	bulan	12	bulan	12	bulan	100%	12	36	60%
	Penyediaan jasa kebersihan, Pengaman dan sopir kantor	Jumlah pembayaran honorarium jasa kebersihan, tenaga pengaman dan sopir kantor	52	bulan	12	bulan	0	bulan	0%	10	22	42%
	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	60	bulan	12	bulan	12	bulan	100%	12	36	60%
	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Tersedianya Barang cetak dan penggandaan	60	bulan	12	bulan	12	bulan	100%	12	36	60%
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen listrik/penerangan	43	komponen	12	komponen	6	komponen	100%	10	28	65%
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah media/surat kabar harian yang disediakan	60	bulan	12	bulan	12	bulan	100%	12	36	60%
	Penyediaan makan dan minum	Tersedianya makan dan minum kantor	60	bulan	12	bulan	12	bulan	100%	12	36	-

		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan luar daerah, pelaksanaan Bintek dan sosialisasi dalam dan luar propinsi	terlaksananya konsultasi dan koordinasi kedalam dan luar provinsi	189	kali	87	kali	37	kali	37	kali	100%	41	165	-
		Penyediaan Tenaga Sopir	Pembayaran honorarium Jasa tenaga Sopir	13	bulan	-	bulan	13	bulan	13	bulan	100%	0	13	100%
		Penyediaan Jasa Pengaman Kantor	Pembayaran honorarium Jasa Pengaman Kantor	13	bulan	-	bulan	13	bulan	13	bulan	100%	0	13	100%
		Penyediaan jasa kebersihan	Pembayaran honorarium Jasa kebersihan	13	bulan	-	bulan	13	bulan	13	bulan	100%	0	13	100%
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	8	jenis	-	jenis	5	jenis	7	jenis	140%	0	7	88%
		Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi	Pembayaran jasa informasi dokumentasi dan publikasi	60	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100%	12	36	60%
		Penataan dan Pengelolaan Arsip	Jumlah bahan kelengkapan penetapan arsip Bapedalda	40	m lari	10	m lari	0	m lari	0	m lari	0%	0	10	25%
		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur</b>												
		Pembangunan Gedung Kantor	Terlaksananya pembangunan gedung kantor bapedalda	2	paket	2	paket	0	-	0	-	0%	0	2	100%
		Pengadaan meubeleur	Jumlah unit meubeleur yang di adakan	16	jenis	0	jenis	3	jenis	3	jenis	100%	4	7	-
		Pengadaan komputer dan jaringan komputerisasi	Tersedianya PC dan laptop/note book, printer, scanner	18	jenis	0	jenis	4	jenis	4	jenis	100%	4	8	-
		Pengadaan kendaraan Dinas	Jumlah unit Kendaraan yang diadakan roda empat roda dua	2	unit	0	unit	3	unit	3	unit	100%	0	3	150%
		Pengadaan Alat Studio, Komunikasi dan Informasi	Tersedianya alat-alat studio dan Komunikasi dan informasi	32	unit	0	unit	11	unit	11	unit	100%	7	18	-
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pengecatan kantor, pemeliharaan pekarangan	37	paket	7	paket	1	paket	1	paket	100%	1	9	24%
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Operasional	Tersedianya suku cadang dan pajak/STNK serta asuransi kendaraan	32	unit	12	unit	6	unit roda empat	6	unit roda empat	100%	7	25	78%
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan	Terlaksananya pemeliharaan instalasi listrik, telepon dan air	60	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100%	12	36	60%
		Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan jaringan komputerisasi	Terlaksananya pemeliharaan komputer dan jaringan komputerisasi	0	jenis	0	jenis	-	jenis	0	-	-	0	0	-

		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya pemeliharaan AC, komputer dan jaringan komputerisasi	133	unit	54	unit	25	unit	47	unit	188%	76	177	133%
		Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD	Pembayaran honor pengawasan dan pengendalian aset SKPD	48	bulan	-	bulan	12	bulan	12	bulan	100%	12	24	50%
		Penataan dan Pengelolaan Arsip	Jumlah bahan kelengkapan penetapan arsip Bapedalda	10	m lari	-	m lari	10	m lari	10	m lari	100%	0	10	100%
		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor	41	jenis	7	jenis	-	-	-	-	0%	3	10	24%
		<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas</b>												
		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas PNS dan PTT	334	stel	67	stel	64	stel	64	stel	100%	82	213	64%
		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur</b>	<b>Terpenuhinya peningkatan sumber daya aparatur</b>												
		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	jumlah keikutsertaan aparatur dalam mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	72	kali	15	kali	5	kali	5	kali	100%	3	23	32%
		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian</b>	<b>1. Terpenuhinya peningkatan sumber daya aparatur2. Nilai LAKIP SKPD (minimal BB)3. Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan4. Persentase kesesuaian usulan renja dengan renstra SKPD5. Persentase kesesuaian usulan renja dengan RPJMD</b>												
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja Bapedalda	44	dokumen	8	dokumen	9	dokumen	9	dokumen	100%	9	26	59%
		Penata usahaan keuangan SKPD	Pembayaran honorarium pengelolaan keuangan	60	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100%	12	36	60%
		Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran Bapedalda	32	dokumen	0	dokumen	8	dokumen	8	dokumen	100%	8	16	50%
		<b>Program Perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan dan asset</b>	<b>Persentase kesesuaian usulan renja dengan renstra SKPD; Persentase kesesuaian usulan renja dengan renstra RPJMD</b>												
		Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran Bapedalda	7	dokumen	9	dokumen	-	dokumen	-	dokumen	0%	0	9	129%

		Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD	Pembayaran honor pengawasan dan pengendalian aset SKPD	12	bulan	12	bulan	-	bulan	-	bulan	0%	0	12	100%
		<b>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</b>	<b>IKLH</b>											0	
		Pengawasan dan Pengendalian sumber Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah objek/kegiatan yang dilakukan wasdal terhadap kerusakan lingkungan (lahan pertambangan dan lahan akses terbuka)	77	objek	9	objek	13	objek / kegiatan		Objek	0%	10	19	25%
		Pengkajian Penetapan Status Mutu Air Sungai Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah sungai yang dikaji dalam rangka penetapan status mutunya	7	sungai	1	sungai	0	-	0	-	0%	0	1	14%
			Pergub status mutu air sungai lintas kab/kota	-	-	1	pergub	0	-	0	-	0%	0	1	
		Pemantauan Kualitas Sumber Air Skala Provinsi	Jumlah sungai yang dipantau	72	sungai	8	sungai	9	sungai	9	sungai		5	22	31%
			Jumlah danau yang dipantau		danau	0	danau	0	danau	0	danau	0%	2		
		Peningkatan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penurunan Beban Pencemaran Sungai	Terbentuknya rencana teknis pemulihian sungai Batang Agam (klaster pengelolaan limbah cair)	11	klaster	1	klaster	0	klaster pengelolaan limbah cair domestik	0	klaster pengelolaan limbah cair domestik	0%	0	1	9%
			Jumlah peserta sosialisasi klaster	60	orang	60	orang	0	-	0	-	0%	0	60	100%
		Pengawasan pengendalian terhadap pengelolaan lingkungan usaha/kegiatan	Jumlah objek kegiatan yang dilakukan pembinaan wasdal pengelolaan lingkungan	110	kegiatan / usaha	27	kegiatan / usaha	18	kegiatan / usaha	20	kegiatan/ usaha	111%	0	47	43%
		Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan (PROPER Daerah)	Jumlah objek kegiatan yang dinilai kinerja pengelolaan lingkungan hidupnya	108	kegiatan	30	kegiatan	13	objek/kegiatan	13	objek/kegiatan	100%	13	56	52%
		Pemantauan Kualitas Udara Ambient	Jumlah Kab/Kota yang dipantau kualitas udara ambiennya	114	kab/kota	18	kab/kota	19	Kab/Kota	19	Kab/Kota	100%	10	47	41%
		Peningkatan Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan Sumatera Barat (Adipura)	Jumlah Kab/Kota yang akan dilakukan pembinaan dan evaluasi	94	kab/kota	14	kab/kota	12	Kab/Kota	14	kabupaten/kota	117%	13	41	44%
		Peningkatan Program Pelindungan Lapisan Ozon dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim.	Jumlah Kab/Kota yang teridentifikasi pemakaian bahan perusak ozon pada bengkel service peralatan pendingin	101	kab/kota	32	kab/kota	0	-	0	-	0%	0	32	32%

		Peningkatan Peran Serta bank sampah Dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Kab/Kota yang dibina terkait aplikasi bank sampah dan peningkatan implementasi konsep 3R dan jumlah bank sampah yang dibangun	113	kab/kota	37	kab/kota	0	Kab/Kota	0	kab/kota	0%	0	37	33%
	Peningkatan Implementasi Gerakan Sumbar Bersih	Terlaksananya penilaian kecamatan/kelurahan bersih Tk. Provisi	<b>107</b>	kel/kec	49	Kecamatan kelurahan	28	Kecamatan kelurahan	26	Kecamatan kelurahan	100% 100%	0	75	46%	
		Jumlah Kab/Kota yang akan dilakukan pembinaan dan evaluasi	114	kab/kota	38	kab/kota	12	kab/kota	12	kab/kota	100%	0	50	44%	
	Peningkatan Pengembangan Laboratorium Lingkungan	Jumlah kab/kota yang laboratorium/Laboratorium DAK dilakukan pembinaan	11	kab/kota	11	kab/kota	0	laboratorium	0	laboratorium	0%	0	11	100%	
		Jumlah peserta Bimtek Akreditasi Laboratorium	19	orang	19	orang	0	orang	0	orang	0%	0	19	100%	
	Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah peserta rapat koordinasi pengelolaan lingkungan hidup,	420	orang	147	orang	64	orang peserta	64	orang	100%	0	211	50%	
		Jumlah Kab/Kota yang dilakukan monitoring dan evaluasi	114	kab/kota	35	kab/kota	19	Kab/Kota	19	Kab/Kota	100%	0	54	47%	
	Program Kampung Iklim	Jumlah Nagari/Jorong/Korong (calon kampung iklim) yang dibina dalam pelaksanaan kegiatan Program Kampung Iklim	27	kab/kota	12	kab/kota	15	kab/kota	15	kab/kota	100%	7	34	126%	
	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah (RAD) Gas Rumah Kaca sektor Pengelolaan Limbah	Jumlah Kab/Kota yang diinventarisasi data penurunan emisi GRK bidang pengelolaan limbah	38	kab/kota	19	kab/kota	19	Kab/Kota	18	kab/kota	95%	0	37	97%	
	Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran Media Lingkungan Hidup	Jumlah percontohan pemulihan pencemaran	4	klaster	0	klaster	1	klaster	1	klaster	100%	0	1	25%	
	Evaluasi dan pengkajian baku mutu limbah cair dan peruntukan sungai	Jumlah dokumen kajian teknis peruntukan sungai	1	dokumen	0	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100%	0	1	100%	
	Pembinaan Pengelolaan Sampah Kab/Kota	Jumlah kabupaten/kota yang dibina dalam pengelolaan persampahan	19	Kab/Kota	0	Kab/Kota	19	Kab/Kota	19	Kab/Kota	100%	0	19	100%	
		Jumlah peserta yang mengikuti bintek	0	orang	0	orang	80	orang	80	orang	100%	0	80	#DIV/0!	
		Jumlah Pergub yang disusun	0	pergub	0	pergub	1	pergub	1	pergub	100%	0	1	#DIV/0!	

		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3	Jumlah objek kegiatan yang dilakukan pembinaan dan pemantauan dalam pengelolaan LB3	212	objek	0	objek	20	objek	33	objek	165%	15	48	23%
		Fasilitasi kerjasama pengelolaan LB3 antar daerah		0	Kab/Kota	0	Kab/Kota	3	Kab/Kota	1	Kab/Kota	33%	0	1	#DIV/0!
Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Penatalaksanaan Penilaian/Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup	Jumlah kab/kota yang dievaluasi kinerja penatalaksanaan penilaian dokumen Amdal atau pemeriksaan UKL-UPL nya	69	Kab/Kota	0	Kab/Kota	12	Kab/Kota	12	Kab/Kota		Kab/Kota	100%	0	12	17%
	Jumlah kab/kota yang dibina/diverifikasi terkait pengajuan lisensi Komisi Penilai Amdalnya	26	Kab/Kota	0	Kab/Kota	6	Kab/Kota	6	Kab/Kota		Kab/Kota	100%	0	6	23%
	Jumlah peserta sosialisasi/bimtek terkait dokumen lingkungan	150	orang	0	orang	55	orang	55	orang		orang	100%	0	55	37%
Pengadaan Peralatan, Supporting laboratorium dan Bahan kimia	Jumlah Pengadaan peralatan, Supporting laboratorium dan bahan Kimia yang disediakan	4	paket	0	paket	1	paket	1	paket		paket	100%	1	2	50%
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	IKLH														
Peningkatan Konservasi kualitas air danau di Provinsi Sumatera Barat	Jumlah danau yang dikordinasikan peran serta stakeholder masyarakat dan dunia usaha dalam pelestarian ekosistem danau	4	danau	4	danau	4	danau	4	danau		danau	100%	0	8	200%
Peningkatan Pembinaan Konservasi Wilayah Pesisir Laut	Jumlah kab/kota kawasan Pesisir Pantai dan Muara Sungai yang dipantau kualitas air lautnya	6	Kab/Kota	6	Kab/Kota	6	Kab/Kota	6	Kab/Kota		Kab/Kota	100%	0	12	200%
Peningkatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati di Sumatera Barat	Jumlah taman kehati yang dibina	4	taman kehati	4	taman kehati	4	taman kehati	4	taman kehati		taman kehati	100%	0	8	200%
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase pengembangan sistem dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup														
Pembinaan dan Penilaian Peranserta Masyarakat dan Kelompok Peduli Lingkungan Hidup (Kalpataru)	Jumlah usulan calon penerima Kalpataru Tk Nasional dari Provinsi Sumbar yang dibina	47	orang/kel	8	orang/kel	9	orang/kelompok	11	orang/kelompok		orang/kelompok	122%	4	23	49%
Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan	Jumlah buku DIKPLHD Prov. Sumbar yang dicetak	160	buku	-	buku	40	buku	40	buku		buku	100%	40	80	50%

		Hidup Daerah (DIKPLHD)	Draft dokumen data DIKPLHD tahun 2018	1	darft	1	draft	1	Draft buku data SLHD Tahun 2017	1	Draft buku data SLHD Tahun 2017	100%	1	3	300%
		Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan hidup	Terlaksananya rangkaian acara edukasi dan kampanye lingkungan hidup	5	even	1	even	1	even	1	even	100%	1	3	60%
		Pegembangan Sistim Informasi Lingkungan	Jumlah paket pengembangan Sistem Informasi Lingkungan	1	paket	1	paket	0	paket	0	paket	0%	0	1	100%
		Peningkatan kapasitas lembaga pendidikan dasar dan menengah dalam pelestarian lingkungan hidup	Jumlah sekolah yang dibina/dinilai dalam program adiwiyata	400	sekolah	0	sekolah	85	sekolah	85	sekolah	100%	50	135	34%
			jumlah peserta sosialisasi	0	orang	0	orang	345	orang	345	orang	100%	150	495	0%
		Program Tata Lingkungan dan Penataan Hukum Lingkungan	<b>Percentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati peraturan perundang-undangan</b>												
		Pembinaan KLHS Terhadap Dokumen Perencanaan	Jumlah kabupaten/kota yang difasilitasi dan/atau dibina untuk penerapan KLHS terhadap dokumen perencanaan		kab/kota	7	kab/kota	8	Kab/Kota	8	kabupaten/kota	100%		15	#DIV/0!
		Pembinaan Hukum Lingkungan dan Perizinan	Jumlah Kab./Kota yang dievaluasi dalam pembinaan hukum dan perizinan serta terhimpunnya data hasil pembinaan hukum dan perizinan		kab/kota	8	kab/kota	10	kab/kota	4	kabupaten/kota	40%	10	22	#DIV/0!
			Jumlah pemilik kegiatan dan/atau usaha yang dilakukan pembinaan dan menaati peraturan bidang lingkungan hidup dan perizinan.		objek	8	objek	4	objek	12	objek	300%	8	28	#DIV/0!
			jumlah peserta yang memahami peraturan perundang-undangan dan mekanisme penegakan hukum lingkungan	0	orang	0	orang	70	orang	70	orang	100%	0	70	0%
		Penaatan Hukum Lingkungan	Jumlah kasus lingkungan hidup yang dapat diselesaikan dan kegiatan dan/atau usaha yang dijadikan objek penegakan hukum		kasus	14	kasus	4	kasus	15	kasus	375%	0	29	#DIV/0!
			Jumlah objek yang dilakukan monitoring dan evaluasi dan implementasi penerapan sanksi		objek	9	objek	4	objek	8	objek	200%	0	17	#DIV/0!

			Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Provinsi Sumatera Barat	Jumlah dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis daya dukung daya tampung lingkungan Propinsi Sumatera Barat;	1	dokumen	0	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100%	0	1	100%
				jumlah dokumen Naskah Akademis yang disusun	1	dokumen	0	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100%	0	1	100%
			<b>Program Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional</b>	<b>Meningkatnya pengelolaan TPA Sampah Regional</b>												
			Pemantauan kualitas lingkungan kawasan TPA Sampah Regional	Jumlah laporan kawasan lingkungan TPA Sampah Regional yang dipantau	16	laporan	0	laporan	4	laporan	4	laporan	100%	2	6	38%
			Pengendalian dan operasional UPTD TPA Sampah Regional	Terlaksananya operasional TPA	8	TPA	0	TPA	2	TPA	2	TPA	100%	2	4	50%

Berdasarkan tabel diatas, secara keseluruhan capaian kinerja Tahun 2018 dianggap berhasil meskipun ada beberapa kegiatan yang pelaksanaanya terlambat oleh faktor teknis diluar kontrol perencanaan, namun dengan upaya, strategi dan peningkatan koordinasi yang dijalankan oleh jajaran Dinas LH Provinsi Sumatera Barat kendala dan hambatan dapat dicarikan jalan pemecahannya.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan SKPD menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra DLH Tahun 2017-2021, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD, dan/atau indikator lainnya seperti MDG's ataupun indikator lain yang telah diratifikasi oleh pemerintah, yang berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut, serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang lingkungan hidup adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang lingkungan hidup yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal, dimana pelayanan dasar bidang lingkungan hidup adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk mendapatkan mutu lingkungan hidup yang baik dan sehat secara berkelanjutan.

Kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat dari capaian kinerja Tahun 2018 berdasarkan cascading yang telah disempurnakan pada triwulan IV Tahun 2018 yang lalu. Capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.3  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Sasaran 1			
Terwujudnya Penataan Lingkungan Hidup			
INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN
Persentase kecukupan instrumen penataan lingkungan di Sumbar	55 %	64,89 %	118
Persentase pemanfaatan instrumen penataan lingkungan	75 %	75 %	100
Sasaran 2			
Terkendalinya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup			
INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN
Persentase penurunan beban pencemaran dan kerusakan lingkungan	5 %	6,52%	130
Indeks Pencemaran Air (IPA)	5 < IPA < 10	2,21	156
Indeks Pencemaran Udara (IPU)	IPU < 11	8,95	100
Sasaran 3			
Terwujudnya upaya-upaya pemeliharaan / konservasi lingkungan hidup			
INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN
Persentase peningkatan upaya-upaya pemeliharaan lingkungan yang sesuai kriteria	15%	16%	107

Sasaran 4			
Meningkatnya kapasitas dan peran serta stakeholders			
INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN
Persentase peningkatan jumlah masyarakat / kelompok masyarakat / lembaga yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan	16%	16%	100
Sasaran 5			
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi			
INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN
Nilai Evaluasi AKIP OPD	B	BB	106
Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program dan kegiatan	95%	98,43%	103,61%
% Capaian rata-rata			113,36%

Dari tabel 2.3 di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja rata-rata untuk 9 indikator kinerja yang mengukur keberhasilan 5 sasaran strategis (SS) tahun 2018 adalah **113%**. Rata-rata capaian indikator kinerja sebesar 113% tersebut termasuk dalam klasifikasi berhasil dengan kategori sangat baik atau dengan kata lain tidak ada indikator kinerja yang tergolong gagal (tingkat capaian >93%).

### 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dari hasil analisis terhadap gambaran pelayanan OPD, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD maupun hasil kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra OPD, maka selanjutnya dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD, untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, dan untuk menentukan peluang dan tantangan dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.

Berdasarkan permasalahan hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi lingkungan hidup yang dihadapi Prov. Sumbar maka dirumuskan isu strategis lingkup pelayanan Prov. Sumbar sebagai berikut :

1. Terkait masalah perubahan kualitas air. Menurunnya kualitas air sungai yang tadinya hanya ada pada perkotaan sekarang sudah dirasakan sampai perdesaan, begitupun dengan kualitas air danau khususnya danau maninjau dan danau singkarak. Tekanan terbesar berasal dari limbah domestik baik limbah cair maupun limbah padat. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa konsentrasi Fecal Coliform dan Total Coliform di 70,6% titik sampling telah melebihi baku mutu. Disamping itu hasil analisis laboratorium juga menunjukkan bahwa parameter sulfida, COD, BOD, TSS, fosfat, dan Nitrit juga sudah menunjukkan kondisi yang melebihi baku mutu di beberapa sungai yang daerah tangkapan airnya merupakan areal pertanian ataupun perkebunan yang cukup luas dan pemakaian pupuk anorganik di Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar 169.636,9 ton/tahun yang terdiri atas 63.759,9 ton urea, 12.212,0 ton ZA, 31.383,0 ton SP 36, dan 62.282,0 ton NPK. Secara keseluruhan indeks pencemaran air Provinsi Sumatera Barat berada pada angka 75,69 kondisi ini lebih baik dari pada tahun 2016 yaitu sebesar 65,40 dan tahun 2015

- sebesar 66,83. Jika dibandingkan dengan IKA di tingkat nasional, kualitas air Provinsi Sumatera Barat juga lebih tinggi dimana IKA nasional Tahun 2017 adalah sebesar 53,2.
2. Terkait masalah limbah dan persampahan. Jumlah penduduk yang semakin meningkat setiap tahun dan dirasakan oleh hampir seluruh kabupaten/kota. Peningkatan jumlah timbulan sampah bergantung pula pada tingkat ekonomi suatu wilayah. Wilayah yang memiliki tingkat ekonomi yang tinggi akan memiliki kebutuhan terhadap barang dan jasa yang tinggi pula sehingga akan berdampak terhadap besarnya jumlah timbulan sampah. Setiap tahun jumlah timbulan sampah selalu meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk. Timbulan sampah Sumatera Barat pada tahun 2017 adalah sebesar 2.452.213 kg/hari dan berasal dari berbagai macam sumber serta memiliki komposisi yang bermacam-macam. Sebagian besar timbulan sampah yang berasal dari permukiman adalah sampah rumah tangga yaitu sampah organik. Kota Padang dan Kota Bukittinggi memiliki jumlah timbulan sampah tertinggi yakni masing-masing sebesar 494.426 kg/hari dan 183.000 kg/hari.
  3. Terkait alih fungsi lahan. Pertumbuhan penduduk memberikan tekanan terhadap perubahan lahan produktif, daerah rawa menjadi perumahan sehingga berdampak pada kemampuan lahan menyerap air. Munculnya isu alih fungsi lahan lebih disebabkan bertambah luasnya lahan pertambangan, perkebunan, permukiman serta berkurangnya lahan pertanian. Lahan pertambangan merupakan bentuk alih fungsi lahan terbesar di Provinsi Sumatera Barat sejak tahun 2011.

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Hasil rancangan awal RKPD belum memenuhi hasil analisis kebutuhan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan pembangunan lingkungan hidup di Tahun 2020.. Untuk mengakomodir semua itu, harus adanya penyesuaian terhadap Anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat. Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada table 2.5

Tabel 2.5  
Review terhadap rancangan awal rkpd tahun 2020  
Provinsi Sumatera Barat

NO	RANCANGAN AWAL RKPD (sesuai Renstra)					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					26.003.000.000					45.990.116.000	
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	1.787.000.000	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Terselenggaranya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran		2.757.378.000	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Padang	Tersedianya materai, paket pengiriman surat dan BBM yang disediakan	12 bulan	40.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Padang	Tersedianya materai, paket pengiriman surat dan BBM yang disediakan	12 bulan	40.000.000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Padang	Pembayaran rekening listrik, telepon, air, faximile, internet	12 bulan	372.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Padang	Pembayaran rekening listrik, telepon, air, faximile, internet	12 bulan	372.000.000	
3	Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor	Padang	Jumlah pembayaran honorarium jasa kebersihan, tenagapengaman dan sopir kantor	13 bulan	610.000.000	Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor	Padang	Jumlah pembayaran honorarium jasa kebersihan, tenagapengaman dan sopir kantor	13 bulan (14 orang tenaga pengaman; 10 orang tenaga sopir; 5 orang tenaga kebersihan)	1.363.378.000	
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Padang	Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	65.000.000	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Padang	Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	65.000.000	
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Padang	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	12 bulan	60.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Padang	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	12 bulan	60.000.000	
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Padang	Tersedianya komponen listrik/penerangan	10 komponen	15.000.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Padang	Tersedianya komponen listrik/penerangan	10 komponen	15.000.000	
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undang	Padang	Jumlah Media/surat kabar harian yang disediakan	12 bulan	32.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undang	Padang	Jumlah Media/surat kabar harian yang disediakan	12 bulan	34.000.000	
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	Padang	Tersedianya makan dan minum kantor	12 bulan	60.000.000	Penyediaan Makanan dan Minuman	Padang	Tersedianya makan dan minum kantor	12 bulan	60.000.000	
9	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah dan keluar daerah	Padang	Jumlah pelaksanaan konsultasi dan koordinasi ke dalam dan luar daerah	40 kali	430.000.000	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah dan keluar daerah	Padang	Jumlah pelaksanaan konsultasi dan koordinasi ke dalam dan luar daerah	40 kali	600.000.000	

10	Penyediaan Jasa Informasi Dokumenter dan Publikasi	Padang	Terlaksananya penyediaan jasa dokumentasi dan publikasi	12 bulan	35.000.000	Penyediaan Jasa Informasi Dokumenter dan Publikasi	Padang	Terlaksananya penyediaan jasa dokumentasi dan publikasi	12 bulan	35.000.000	
11	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Padang	Jumlah kendaraan yang dialokasikan premi asuransinya	7 kendaraan roda empat	47.000.000	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Padang	Jumlah kendaraan yang dialokasikan premi asuransinya,	10 kendaraan roda empat, 2 unit bangunan, traktor	113.000.000	
12	Penataan dan Pengelolaan Arsip	Padang	Jumlah Bahan kelengkapan penetapan arsip DLH	10 meter lari	21.000.000	Penataan dan Pengelolaan Arsip	Padang	Jumlah Bahan kelengkapan penetapan arsip Bapedalda	10 meter lari	0	
II	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur</b>	100%	<b>1.782.000.000</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>Meningkatnya sarana dan prasarana</b>		<b>1.665.488.000</b>	
1	Pengadaan Meubeleur	Padang	Jumlah unit meubeleur yang diadakan	4 jenis	250.000.000	Pengadaan Meubeleur	Padang	Jumlah unit meubeleur yang diadakan	4 jenis	250.000.000	
2	Pengadaan kendaraan Dinas	Padang	Jumlah unit Kendaraan yang diadakan	1 unit	500.000.000	Pengadaan kendaraan Dinas	-	-	-	0	
3	Pengadaan Komputer dan jaringan komputerisasi	Padang	Tersedianya PC, laptop/notebook, printer, scaner	5 jenis	167.000.000	Pengadaan Komputer dan jaringan komputerisasi	Padang	Tersedianya PC, laptop/notebook, printer	10 jenis	196.443.000	
	Pengadaan Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi	Padang	Tersedianya alat-alat studio, komunikasi dan informasi	8 unit	225.000.000	Pengadaan Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi	Padang	Tersedianya alat-alat studio, komunikasi dan informasi	8 unit	311.850.000	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Padang	Terlaksananya paket pemeliharaan gedung kantor	8 paket	200.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Padang	Terlaksananya paket pemeliharaan gedung kantor (pengecatan gedung, taman, WC, kunci dan lantai)	1 paket	250.000.000	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Padang	Tersedianya suku cadang, pajak STNK dan asuransi kendaraan	7 unit	72.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Padang	Tersedianya suku cadang, pajak STNK	10 unit	99.000.000	
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Padang	Terlaksananya pemeliharaan AC	5 unit	50.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Padang	Terlaksananya pemeliharaan AC, server, komputer, laptop, ups, printer, kamera digital, fax, telepon, mesin hitung, cctv,mesin absensi, smart tv	113 unit	55.545.000	
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Padang	Terlaksananya pemeliharaan komputer dan jaringan komputerisasi	12 jenis	34.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	-	-	-	0	
6	Pemeliharaan rutin/berkala instalasi dan jaringan	Padang	Terlaksananya pemeliharaan isntalasi dan jaringan listrik, telp dan air	12 bulan	34.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala instalasi dan jaringan	Padang	Terlaksananya pemeliharaan isntalasi dan jaringan listrik, telp dan air	12 bulan	35.650.000	

9	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Padang	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	11 jenis	250.000.000	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Padang	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	11 jenis	267.000.000	
10	-	-	-	-	0	Pembangunan Gedung Kantor	Padang	Terlaksananya pembangunan gedung kantor (Green house dan dapur kantor)	2 paket	50.000.000	
11	-	-	-	-	0	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Padang	Terlaksananya paket rehabilitasi gedung kantor (Penambahan kanopi, rehap ruangan)	2 paket	150.000.000	
III	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>		<b>Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas</b>	100%	<b>60.000.000</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>		<b>Terselenggaranya peningkatan disiplin aparatur</b>		<b>71.250.000</b>	
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Padang	Tersedianya pakaian dinas PNS dan PTT	68 pegawai	60.000.000	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Padang	Tersedianya pakaian dinas pegawai	95 pegawai	71.250.000	
IV	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur</b>		<b>Terpenuhinya peningkatan sumber daya aparatur</b>	100%	<b>128.000.000</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur</b>		<b>Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur</b>		<b>128.000.000</b>	
1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Padang	Jumlah keikutsertaan aparatur dalam mengikuti bimtek implementasi peraturan Perundang-undangan	15 kali	128.000.000	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Padang	Jumlah keikutsertaan aparatur dalam mengikuti bimtek implementasi peraturan Perundang-undangan	7 kali	128.000.000	
V	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian</b>		<b>1. Terpenuhinya peningkatan sumber daya aparatur 2. Nilai LAKIP SKPD (minimal BB) 3. Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan 4. Persentase kesesuaian usulan renja dengan renstra SKPD 5. Persentase kesesuaian usulan renja dengan RPJMD</b>	100% BB 100% 100% 100%	<b>381.000.000</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian</b>		<b>1. Terpenuhinya peningkatan sumber daya aparatur 2. Nilai LAKIP SKPD (minimal BB) 3. Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan 4. Persentase kesesuaian usulan renja dengan renstra SKPD 5. Persentase kesesuaian usulan renja dengan RPJMD</b>		<b>559.000.000</b>	
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Padang	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar kerja DLH	9 dokumen	70.000.000	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Padang	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar kerja DLH	9 dokumen	70.000.000	
2	Penata usahaan keuangan SKPD	Padang	Tertibnya administrasi keuangan SKPD	12 bulan	200.000.000	Penata usahaan keuangan SKPD	Padang	Tertibnya administrasi keuangan SKPD	12 bulan	250.000.000	

3	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Padang	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran DLH	8 dokumen	27.000.000	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Padang	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran DLH	8 dokumen	27.000.000	
4	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD	Padang	Pembayaran Honor pengawasan dan pengendalian asset SKPD	12 bulan	84.000.000	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD	Padang	Pembayaran Honor pengawasan dan pengendalian asset SKPD	12 bulan	92.000.000	
5	-	-	-	-	0	Monitoring dan Evaluasi dan Kegiatan SKPD	19 Kab/Kota	Jumlah peserta Rakor PLH	67 Orang	120.000.000	
			-	-				Jumlah Kab/Kota yang dilakukan monitoring dan evaluasi	19 Kab/Kota		
IV	<b>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</b>		<b>IPA IPU</b>	<b>5 &lt; IPA &lt; 10 IPU &lt;11</b>	<b>7.645.000.000</b>	<b>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</b>				<b>6.095.000.000</b>	
1	Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran Media Lingkungan Hidup		Jumlah percontohan pemulihan pencemaran	1 klaster	300.000.000	Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran Media Lingkungan Hidup	Kab. Agam	Jumlah percontohan pemulihan pencemaran	1 klaster	250.000.000	
			Jumlah dokumen kajian penanggulangan dan pemulihan pencemaran	1 Dokumen				-	-		
2	Pemantauan Kualitas Sumber Air Skala Provinsi		Jumlah sungai skala provinsi yang dipantau	11 Sungai	400.000.000	Pemantauan Kualitas Sumber Air Skala Provinsi		-	-	0	
				5 danau	100.000.000			-	-		
3	Pemantauan Kualitas Udara Ambien		Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pemantauan kualitas udara ambien	19 Kab/kota	175.000.000	<b>Pemantauan kualitas media lingkungan dan sumber pencemaran</b>	19 Kab/Kota	<b>jumlah kualitas media lingkungan dan sumber pencemaran</b>	<b>10 media, 30 kegiatan/usaha</b>	<b>300.000.000</b>	
4	Pemantauan pesisir dan laut		jumlah kabupaten/kota kawasan pesisir pantai dan muara sungai yang dipantau kualitas air lautnya	6 kab/kota	80.000.000	Pemantauan pesisir dan laut	Kota Padang, Kota Pariaman, Kab. Padang Pariaman, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Agam dan Kab. Pasaman Barat	-	-	0	
5	Penetapan dan evaluasi baku mutu lingkungan dan baku mutu limbah cair usaha dan/atau kegiatan		Jumlah kajian baku mutu industri/kegiatan skala kecil	1 dokumen (2 kegiatan)	250.000.000	Penetapan dan evaluasi baku mutu limbah usaha dan/atau kegiatan	-	-	-	0	
6	Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan daerah (PROPERDA)		Jumlah objek kegiatan yang dinilai kinerja pengelolaan lingkungan hidupnya	25 kegiatan	250.000.000	Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan daerah (PROPERDA)	19 Kab/Kota	Jumlah objek kegiatan yang dinilai peringkat kinerja pengelolaan lingkungan hidupnya	25 kegiatan	200.000.000	

7	Pembinaan dan pengawasan pengelolaan limbah B3	Jumlah objek kegiatan yang dilakukan pembinaan dan pemantauan dalam pengelolaan LB3 (penghasil, pemanfaat, pengumpul, pengangkut)	63 objek	340.000.000	Pembinaan dan pengawasan pengelolaan limbah B3	19 Kab/Kota	Jumlah objek kegiatan yang dilakukan pembinaan dan pemantauan dalam pengelolaan LB3 (penghasil, pemanfaat, pengumpul, pengangkut, depo/centerpoint)	45 objek dan 4 depo/centerpoint	200.000.000	
8	Pilot projek pengelolaan LB3	Jumlah dokumen lingkungan pengelolaan LB3 yang disusun	1 dokumen	500.000.000	Pilot projek pengelolaan LB3		Jumlah dokumen lingkungan pengelolaan LB3 yang disusun	2 dokumen (DED dan AMDAL)	1.400.000.000	
9	Peningkatan Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan (Adipura)	Jumlah kab /kota yang dibina dan dinilai	14 Kab/kota	315.000.000	Peningkatan Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan (Adipura)		Jumlah kab /kota yang dibina dan dinilai	14 Kab/kota	350.000.000	
10	Penanggulangan dan pemulihan kerusakan LH	Jumlah kerusakan lingkungan yang difasilitasi pemulihannya (lahan akses terbuka / biomassa / mangrove / terumbu karang)	2 dokumen	50.000.000	Penanggulangan dan pemulihan kerusakan LH	Kab. Sijunjung	Jumlah lokasi yang difasilitasi pemulihannya	2 lokasi (sijunjung dan Dhamasraya)	100.000.000	
11	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan	Jumlah objek yang dilakukan pembinaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan lingkungan	40 kegiatan/usaha	300.000.000	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan	19 Kab/Kota	-	-	0	
12	Pengawasan dan pengendalian sumber kerusakan LH	Jumlah sumber kerusakan lingkungan yang diidentifikasi kerusakannya dan ditindaklanjuti dengan upaya upaya pencegahan	25 objek	175.000.000	Pengawasan dan pengendalian sumber kerusakan LH	Kab. Dharmasraya, Kab. Sijunjung, Kota Padang, Kab. Padang Pariaman, Kab. Solok Selatan, kab. Solok, Kab Pesisir Selatan, Kab. Pasaman Barat, Kab. Pasaman, Kab. Tanah Datar, Kab. Agam, Kota Payakumbuh, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah sumber kerusakan lingkungan yang diidentifikasi kerusakannya dan ditindaklanjuti dengan upaya upaya pencegahan	25 objek	175.000.000	
13	Pemantauan kualitas lahan dan biota Laut	Jumlah objek biomassa yang dipantau	13 objek	125.000.000	Pemantauan kualitas lahan dan biota Laut	19 Kab/Kota	-	-	-	

			Jumlah objek gambut yang dipantau	8 objek	100.000.000			Jumlah objek gambut yang dipantau	8 objek	100.000.000	
			Jumlah objek mangrove yang dipantau	10 objek	125.000.000			Jumlah objek mangrove yang dipantau	10 objek	100.000.000	
			Jumlah objek terumbu karang yang dipantau	8 objek	100.000.000			Jumlah objek terumbu karang yang dipantau	8 objek	100.000.000	
14	Pembinaan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim (Program Kampung Iklim)		Jumlah Kab/Kota yang dibina dalam pelaksanaan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	19 Kab/Kota	170.000.000	Pembinaan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim (Program Kampung Iklim)		Jumlah Kab/Kota yang dibina dalam pelaksanaan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	19 Kab/Kota	170.000.000	
								Jumlah peserta sosialisasi program kampung iklim	60 orang		
15	Pengembangan teknologi pengelolaan lingkungan hidup		Jumlah Penerapan teknologi tepat guna pengolahan limbah industri kecil yang dihasilkan	1 dokumen	100.000.000	Pengembangan teknologi pengelolaan lingkungan hidup		Jumlah Penerapan teknologi tepat guna pengolahan limbah industri kecil yang dihasilkan	1 dokumen	0	
16	Pengadaan peralatan, Suporting laboratorium dan bahan Kimia		Jumlah Pengadaan peralatan, Supporting laboratorium dan bahan Kimia yang disediakan	1 paket	2.815.000.000	Pengadaan peralatan, Suporting laboratorium dan bahan Kimia	Padang	Jumlah Pengadaan peralatan, Supporting laboratorium dan bahan Kimia yang disediakan	1 paket	1.800.000.000	
17	Pengujian laboratorium kualitas lingkungan		Jumlah laporan hasil pengujian kualitas lingkungan	100 sampel	335.000.000	Pengambilan dan pengujian parameter kualitas lingkungan dan sampel pengelolaan limbah	-	Jumlah laporan hasil pengujian kualitas lingkungan (air, air laut, ambien, air danau, tanah)	185 sampel	400.000.000	
18	Akreditasi laboratorium lingkungan Prov.Sumbar		Jumlah dokumen akreditasi laboratorium yang disusun	2 dokumen	100.000.000	<b>pengendalian mutu laboratorium lingkungan Prov.Sumbar</b>	Padang	Jumlah dokumen persiapan akreditasi laboratorium yang disusun	paket	100.000.000	
19	Pembinaan Laboratorium Lingkungan di Kab/Kota		Jumlah laboratorium lingkungan Kab/Kota yang dibina	10 laboratorium	100.000.000	Pembinaan Laboratorium Lingkungan di Kab/Kota	-	-	-	0	
20	Pengendalian dan operasional UPTD Laboratorium		Terlaksananya operasional laboratorium lingkungan Prov. Sumbar	1 unit	165.000.000	Operasional UPTD Laboratorium	Padang	Terlaksananya operasional laboratorium lingkungan Prov. Sumbar	12 bulan	200.000.000	
21	Peningkatan kualitas personil laboratorium Prov. Sumbar		Jumlah personil laboratorium yang ditingkatkan kompetensinya	6 orang	125.000.000	Peningkatan kualitas personil laboratorium Prov. Sumbar	Padang	Jumlah personil laboratorium yang ditingkatkan kompetensinya	6 orang	150.000.000	
22	-		-	-	0	Kajian daya tampung beban pencemaran sungai skala provinsi	-	-	-	0	
V	<b>Program Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan</b>		<b>Persentase ketaatan pemilik usaha dan/atau kegiatan terhadap hukum lingkungan</b>	<b>60%</b>	<b>1.455.000.000</b>	<b>Program Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan</b>		<b>Persentase ketaatan pemilik usaha dan/atau kegiatan terhadap hukum</b>		<b>1.125.000.000</b>	

							lingkungan			
1	Penyusunan peraturan perundang undangan bidang lingkungan hidup		Jumlah peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup yang disusun	3 Perda / Pergub / Kepgub	250.000.000	Penyusunan peraturan perundang undangan bidang lingkungan hidup	Padang	Jumlah peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup yang disusun	4 Perda / Pergub / Kepgub	250.000.000
2	Peningkatan kapasitas aparatur Dinas LH Prov dan kab/kota dalam penegakan hukum lingkungan		Jumlah aparatur yang mengikuti diklat PPLH / PPNS	20 orang	330.000.000	Peningkatan kapasitas aparatur Dinas LH Prov dan kab/kota dalam penegakan hukum lingkungan		Jumlah aparatur yang mengikuti diklat PPLH / PPNS	20 orang	0
3	Sosialisasi peraturan perundang-undangan		Jumlah peraturan yang disosialisasikan	3 peraturan	200.000.000	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Padang	Jumlah peraturan yang disosialisasikan	2 peraturan	200.000.000
4	Pembinaan hukum dan perizinan lingkungan		Jumlah instansi lingkungan hidup dan pemilik usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pembinaan dan perizinan	8 kab/kota	225.000.000	Pembinaan hukum dan perizinan lingkungan	Kab. Pasaman barat, Kab. Dharmasraya, Kab. Solok Selatan, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Agam, Kab. Solok, Kota Sawahlunto, Kota Pariaman	Jumlah instansi lingkungan hidup dan pemilik usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pembinaan dan perizinan	8 kab/kota	225.000.000
			jumlah pemilik usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pembinaan dan perizinan	10 objek				jumlah pemilik usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pembinaan dan perizinan	15 objek	
5	Penaatan hukum lingkungan		Jumlah kasus lingkungan hidup yang dapat diselesaikan dan kegiatan dan/atau usaha yang dijadikan objek penegakan hukum	8 kasus	225.000.000	Penaatan hukum lingkungan	19 Kab/Kota	Jumlah objek usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan penegakan hukum lingkungan dan monev gakkum (sanksi administrasi, perdata, pidana)	7 kasus (2 gakum, 5 monev)	225.000.000
			Jumlah kasus lingkungan hidup yang dapat difasilitasi penyelesaiannya	8 kasus	225.000.000			Jumlah kasus lingkungan hidup yang dapat difasilitasi penyelesaiannya	7 kasus	225.000.000
	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan		Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	2%	1.290.000.000	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan		Persentase penurunan volume sampah melalui implementasi 3R	%	23.720.000.000

1	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah	Jumlah kegiatan / kelompok masyarakat yang mengaplikasikan 3R sampah	2 kelompok	210.000.000	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah		Jumlah kegiatan / kelompok masyarakat yang difasilitasi dalam mengaplikasikan 3R sampah	2 kelompok (TPA Solok dan pasar Padang)	300.000.000	
2	Pembangunan pilot projek 3R di permukiman	Jumlah pilot project pengelolaan 3R yang dibangun	1 pilot project	550.000.000	Pembangunan pilot projek 3R di permukiman		-	-	0	
3	Pembinaan pengelolaan sampah kab/kota	Jumlah kabupaten/kota yang dibina dalam pengelolaan persampahan	19 kab/kota	100.000.000	Pembinaan pengelolaan sampah kab/kota	19 Kab/Kota	Jumlah kabupaten/kota yang dibina dalam pengelolaan persampahan	19 kab/kota	250.000.000	
4	Peningkatan Implementasi Gerakan Sumbar Bersih	Jumlah kecamatan/kelurahan yang dibina dan dinilai	26 kec/kel	330.000.000	Peningkatan Implementasi Gerakan Sumbar Bersih	19 Kab/Kota	Jumlah kecamatan/kelurahan yang dibina dan dinilai	26 kec/kel	470.000.000	
5	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	Jumlah kab/kota yang dimonitoring/dievaluasi pelaksanaan PPSP	19 kab/kota	100.000.000	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	19 Kab/Kota	Jumlah kab/kota yang dimonitoring/dievaluasi pelaksanaan PPSP	19 kab/kota	100.000.000	
6	-	-	-	0	Pembebasan tanah untuk pengembangan TPA Regional Payakumbuh	Kota Payakumbuh	Luas tanah yang dibebaskan	19.500 m <sup>2</sup>	3.500.000.000	
7	-	-	-	0	Pelatihan pengelolaan sampah 3R untuk sektor informal di TPA Regional	Kota Payakumbuh dan Kota Solok	Jumlah masyarakat yang dilatih	60 orang	100.000.000	
8	-	-	-	0	Pengadaan teknologi Gasifikasi		Jumlah pengadaan teknologi gasifikasi	1 paket	19.000.000.000	
	Program Tata Lingkungan, Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	1) Persentase kecukupan instrumen penataan lingkungan di Sumbar	35%	1.960.000.000	Program Tata Lingkungan, Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam		1) Persentase kecukupan instrumen penataan lingkungan di Sumbar		2.080.000.000	
		2) Persentase pemanfaatan instrumen penataan lingkungan	74%				2) Persentase pemanfaatan instrumen penataan lingkungan			
		3) Persentase peningkatan upaya-upaya pemeliharaan lingkungan yang sesuai kriteria	32%				3) Persentase peningkatan upaya-upaya pemeliharaan lingkungan yang sesuai kriteria			
1	Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah peserta Rakor PLH	67 Orang	120.000.000	Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup		-	-	0	
		Jumlah Kab/Kota yang dilakukan monitoring dan evaluasi	19 Kab/Kota				-	-		

2	Pembinaan dan evaluasi penyusunan RPPLH berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan	Jumlah Kab/Kota yang dibina dan dievaluasi penyusunan RPPLH berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan	19 kab/kota	200.000.000	Pembinaan dan evaluasi penyusunan RPPLH berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan	-	-	0	
3	Valuasi ekonomi lingkungan melalui Insentif, disinsentif dan pendanaan lingkungan	Jumlah instrumen valuasi ekonomi lingkungan (insentif, disinsentif dan pendanaan lingkungan) yang disusun	1 dokumen	400.000.000	Valuasi ekonomi lingkungan melalui Insentif, disinsentif dan pendanaan lingkungan	Jumlah instrumen valuasi ekonomi lingkungan (insentif, disinsentif dan pendanaan lingkungan) yang disusun	1 dokumen	250.000.000	
		Jumlah instrumen vakuasi ekonomi lingkungan diterapkan	1 instrumen	100.000.000		Jumlah Kab/kota yang difasilitasi dalam penerapan valuasi ekonomi	2 kota		
4	Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Penatalaksanaan Penilaian/Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup	Jumlah kab/kota yang dievaluasi kinerja penatalaksanaan penilaian dokumen Amdal atau pemeriksaan UKL-UPL nya	19 kab/kota	300.000.000	Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Penatalaksanaan Penilaian/Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup	Jumlah kab/kota yang dievaluasi kinerja penatalaksanaan penilaian dokumen Amdal atau pemeriksaan UKL-UPL nya	15 kab/kota		
		Jumlah kab/kota yang dibina/diverifikasi terkait pengajuan lisensi Komisi Penilai Amdalnya	7 kab/kota			Jumlah kab/kota yang dibina/diverifikasi terkait pengajuan lisensi Komisi Penilai Amdalnya	7 kab/kota	200.000.000	
		Jumlah peserta sosialisasi/bimtek terkait dokumen lingkungan	75 orang			Jumlah peserta sosialisasi/bimtek terkait dokumen lingkungan	75 orang		
5	Pembinaan KLHS Terhadap Dokumen Perencanaan	Jumlah kab/kota yang dibina dalam pelaksanaan KLHS terhadap dokumen perencanaan	10 Kab/kota	140.000.000	Pembinaan KLHS, RPPLH, daya dukung Terhadap Dokumen Perencanaan	Jumlah kab/kota yang dibina dalam pelaksanaan KLHS terhadap dokumen perencanaan	10 Kab/kota	140.000.000	
		Jumlah peserta sosialisasi/bimtek terkait pelaksanaan KLHS	50 orang	100.000.000		Jumlah peserta klinik asistensi penyusunan KLHS Kabupaten Kota	100 orang	100.000.000	Klinik asistensi penyusunan KLHS bisa lebih fokus dan terarah dalam membantu/membina kabupaten/kota dalam penyusunan KLHS
6	Pemetaan Ekosistem Pemeliharaan Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Ekosistem yang di petakan potensi kawasan.	1 ekosistem	240.000.000	Pemeliharaan Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati	Rencana Induk Pengelolaan (RIP) Kehati	1 dokumen		Kegiatan berupa identifikasi ekosistem bermilai penting (danau, karst, mangrove, area bermilai konservasi tinggi) dan kehati baik tingkat spesies maupun ekosistem
						jumlah lokasi yang difasilitasi pemeliharaan lingkungan	3 lokasi	240.000.000	

										(desa kehati & taman kehati) dan penyusunan Rencana Induk Pengelolaan (RIP).
7	Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola kawasan pemeliharaan lingkungan		Jumlah petugas yang mengikuti pelatihan pemeliharaan kawasan	20 orang	120.000.000	Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola kawasan pemeliharaan lingkungan	-	-	0	
			Jumlah kelompok/lembaga pemeliharaan yang dibina (pemeliharaan danau, das, RTH dll)	4 kelompok						
8	Fasilitasi dan model penetapan kawasan pemeliharaan		jumlah kawasan pemeliharaan yang kembangkan	4 kawasan	90.000.000	Fasilitasi dan model penetapan kawasan pemeliharaan	-	-	0	
9	Perlindungan atmosfir dari perusak ozon (BPO) dan emisi gas rumah kaca (GRK)		Jumlah Kab/kota yang diidentifikasi pemakaian bahan perusak ozon dan emisi gas rumah kaca	19 kab/kota	150.000.000	Perlindungan atmosfir dari perusak ozon (BPO) dan emisi gas rumah kaca (GRK)	Jumlah Kab/kota yang diidentifikasi pemakaian bahan perusak ozon dan emisi gas rumah kaca (GRK)	19 kab/kota	150.000.000	Bimtek IGRK dilakukan untuk pemahaman lebih lanjut terkait pelaporan IGRK yang merupakan kewajiban pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
10	-	-	-	-	0	Penyusunan dokumen Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) Laut	Jumlah Dokumen Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) Laut	1 Dokumen	200.000.000	1. Amanat KLHS RZWP3K dan Perda No 2 Tahun 2018 tentang RZWP3K 2. Kegiatan ini merupakan pendampingan dan sinergi dengan kegiatan KLHK dalam penetapan DDDTLH laut di Indonesia yang dirancang selama 3 (tiga) tahun kegiatan yang dimulai tahun 2019 s/d 2021. 2. Kegiatan ini merupakan pendampingan dan sinergi dengan kegiatan KLHK dalam penetapan DDDTLH laut di Indonesia yang

											dirancang selama 3 (tiga) tahun kegiatan yang dimulai tahun 2019 s/d 2021.
11	-	-	-	-	0	Penyusunan dokumen lingkungan TPA Regional Payakumbuh	Padang	Jumlah paket dokumen lingkungan yang disusun	1 paket	800.000.000	
	<b>Program Peningkatan Kualitas Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</b>		<b>Percentase peningkatan jumlah masyarakat/kelompok masyarakat / lembaga yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan</b>	19%	<b>1.815.000.000</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</b>		<b>Percentase peningkatan jumlah masyarakat/kelompok masyarakat / lembaga yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan</b>		<b>1.725.000.000</b>	
1	Pembinaan dan Penilaian Peranserta Masyarakat dan Kelompok Peduli Lingkungan Hidup (Kalpataru)		Jumlah calon yang dibina untuk diusulkan sebagai calon penerima kalpataru	10 orang / kolompok	100.000.000	Pembinaan dan Penilaian Peranserta Masyarakat dan Kelompok Peduli Lingkungan Hidup (Kalpataru)	19 Kab/Kota	Jumlah calon yang dibina untuk diusulkan sebagai calon penerima kalpataru	10 orang / kolompok	100.000.000	
2	Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD)		Jumlah buku DIKPLHD Prov. Sumbar yang dicetak	40 buku	275.000.000	Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD)		Jumlah buku DIKPLHD Prov. Sumbar yang dicetak	40 buku	275.000.000	
			Jumlah Kab/Kota yang ditetapkan sebagai Penyusun Buku DIKPLHD terbaik Tingkat Propinsi Sumatera Barat	5 kab/kota				-	-		
3	GEPULING (Gerakan Penyuluhan Lingkungan)		Jumlah penyuluhan multi sektor yang ditingkatkan wawasan lingkungannya dan diberdayakan dalam penyebarluasan informasi lingkungan hidup	50 orang	80.000.000	GEPULING (Gerakan Penyuluhan Lingkungan)	Padang	Jumlah penyuluhan multi sektor yang ditingkatkan wawasan lingkungannya dan diberdayakan dalam penyebarluasan informasi lingkungan hidup	50 orang	<b>100.000.000</b>	
								<b>Fasilitasi penerapan gepuling</b>	2 kab/kota		
4	Peningkatan kapasitas lembaga pendidikan dasar dan menengah dalam pelestarian lingkungan hidup		Jumlah sekolah yang dibina dan dinilai dalam program Adiwiyata	100 sekolah	1.175.000.000	Peningkatan kapasitas lembaga pendidikan dasar dan menengah dalam pelestarian lingkungan hidup	19 Kab/Kota	Jumlah sekolah yang dibina dan dinilai dalam program Adiwiyata	100 sekolah	935.000.000	
5	Koordinasi Pengelolaan Inovasi Lingkungan		Jumlah inovasi lingkungan yang dikoordinasikan dan ditindaklanjuti	10 inovasi	35.000.000	Koordinasi Pengelolaan Inovasi Lingkungan	Padang	Jumlah inovasi lingkungan yang dikoordinasikan dan ditindaklanjuti	10 inovasi	35.000.000	
6	Peningkatan edukasi dan kampanye masyarakat di bidang lingkungan		Jumlah rangkaian acara edukasi dan kampanye lingkungan hidup	2 even	150.000.000	<b>Peningkatan edukasi dan kampanye masyarakat di bidang lingkungan</b>	Padang	Jumlah rangkaian acara edukasi dan kampanye lingkungan hidup	3 even	280.000.000	

	<b>Program Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional</b>		<b>Terselenggaranya pengelolaan TPA Sampah Regional</b>	100%	<b>7.700.000.000</b>	<b>Program Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional</b>		<b>Meningkatkan pengelolaan TPA Sampah Regional</b>		<b>6.064.000.000</b>	
1	Pemantauan kualitas lingkungan kawasan TPA Sampah Regional		Jumlah laporan kawasan lingkungan TPA Sampah Regional yang dipantau	4 Laporan	200.000.000	Pemantauan kualitas lingkungan kawasan TPA Sampah Regional	Kota Payakumbuh dan Kota Solok	Jumlah laporan kawasan lingkungan TPA Sampah Regional yang dipantau	4 Laporan	164.000.000	
2	Peningkatan pembangunan Infrastruktur TPA Regional		Tersedianya infrastruktur di TPA Sampah Regional	2 lokasi	1.300.000.000	Peningkatatan pemeliharaan Infrastruktur TPA Regional	Kota Payakumbuh dan Kota Solok	Tersedianya infrastruktur di TPA Sampah Regional	2 lokasi	1.300.000.000	
3	Pengendalian dan operasional UPTD TPA Sampah Regional		Terlaksananya operasional TPA	2 TPA	6.200.000.000	Pengendalian dan operasional UPTD TPA Sampah Regional	Kota Payakumbuh dan Kota Solok	Terlaksananya operasional TPA	2 TPA	3.600.000.000	
4	-	-	-	-	-	Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung TPA Sampah Regional	Kota Payakumbuh dan Kota Solok	Terlaksananya pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung TPA Sampah Regional	2 TPA	1.000.000.000	

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020 secara umum telah mengakomodir program dan kegiatan yang diusulkan oleh Kab/Kota, hal ini dimungkinkan karena isu lingkungan hidup disetiap wilayah dapat dikatakan serupa. Usulan program dan kegiatan urusan lingkungan hidup diperoleh melalui pengumpulan data dan informasi perencanaan lingkungan hidup di Kabupaten/Kota, yang selanjutnya akan direkapitulasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat sebagai bahan yang akan dibahas pada Rapat Koordinasi Program/Kegiatan tingkat Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2019.

## Bab III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

### 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Memperhatikan 10 (sepuluh) Prioritas Pembangunan Daerah dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 yang relevan dengan kondisi lima tahun kedepan yaitu :

1. Pembangunan mental dan pengamalan agama dan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah (ABS-SBK) dalam kehidupan masyarakat;
2. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan;
3. Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan;
4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
5. Peningkatan produksi untuk mendukung kedaulatan pangan nasional dan pengembangan agribisnis;
6. Pengembangan pariwisata, industry, perdagangan, koperasi, UMKM dan Peningkatan investasi;
7. Peningkatan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelautan;
8. Penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah tertinggal;
9. Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan serta pembangunan infrastruktur;
10. Pelestarian lingkungan hidup dan penaggulangan bencana.

Maka dari 10 prioritas di atas, yang berkaitan erat dengan Lingkungan Hidup adalah prioritas nomor 10 yaitu Pelestarian lingkungan hidup dan penaggulangan bencana dengan program strategis sebagai berikut :

- a. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.
- b. Program Tata Lingkungan, Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
- c. Program Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan.
- d. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan.
- e. Program Peningkatan Kualitas Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
- f. Program Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional.
- g. Program pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan.
- h. Program pengembangan sistem dan pengelolaan laboratorium lingkungan.
- i. Program Peningkatan Kapasitas SDM.

Selain melalui 9 (sembilan) program strategis di atas, dukungan OPD Lingkungan Hidup dalam pencapaian sasaran tersebut di atas juga melalui Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta program pendukung lainnya berupa Program Pelayanan administrasi perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, dan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Secara teknis selain dukungan bagi pencapaian sasaran pokok arah kebijakan pembangunan pada RPJM ke 4 dan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat tersebut di atas, pelaksanaan pembangunan sektor dan urusan lingkungan hidup Tahun 2019 oleh Dinas Lingkungan Hidup bertujuan sebagai berikut:

1. Terwujudnya lingkungan yang tertata.
2. Terwujudnya kualitas media lingkungan hidup yang layak.
3. Terwujudnya pemeliharaan / konservasi sumber daya alam.
4. Terwujudnya peningkatan kapasitas lingkungan dan peran serta stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Berdasarkan tujuan tersebut selanjutnya Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat menjabarkannya dalam 5 (lima) sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat 2017-2021 serta RPJMD Sumatera Barat 2016-2021. Sasaran strategis dan indikator kinerja utama sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis selama periode 2017-2021 seperti pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1

Tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran tahun 2020

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target Kinerja Sasaran pada tahun 2019
1.	Terwujudnya tata lingkungan	Terwujudnya penataan lingkungan hidup	1. Persentase kecukupan instrumen penataan lingkungan di Sumbar	72%
			2. Persentase pemanfaatan instrumen penataan lingkungan	76%
2.	Terwujudnya kualitas media lingkungan hidup yang layak	Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	1. Persentase penurunan beban pencemaran dan kerusakan lingkungan	10%
			2. Indeks Pencemaran Air (IPA)	5 < IPA < 10
			3. Indeks Pencemaran Udara (IPU)	IPU < 11
3.	Terwujudnya pemeliharaan / konservasi sumber daya alam	Terwujudnya upaya-upaya pemeliharaan / konservasi lingkungan hidup	Persentase peningkatan upaya-upaya pemeliharaan lingkungan yang sesuai kriteria	13%
4.	Terwujudnya peningkatan kapasitas lingkungan dan peran serta stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup	1. Meningkatnya kapasitas dan peran serta stakeholder 2. Meningkatnya tata kelola organisasi	Persentase peningkatan jumlah masyarakat/kelompok masyarakat / lembaga yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan	19%
			1. Nilai evaluasi AKIP OPD 2. Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program / kegiatan	BB 96%

### 3.3 Program dan Kegiatan

Berdasarkan Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan strategi yang telah disusun untuk Rencana Pembangunan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020, perlu dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk rencana Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja dari masing-masing program.

Pada Tahun 2020 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat direncanakan menjalankan 11 Program dan 70 kegiatan yang bersumber dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Uraian rencana Program dan Kegiatan beserta indikatornya pada Tahun 2020 dapat terlihat pada tabel 3.3 (terlampir).

Tabel 3.3  
Rencana Program Dan Kegiatan Skpd Tahun 2019 Dan Perkiraan Maju Tahun 2020

Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	WAJIB								
	Lingkungan Hidup				11.429.294.000				50.717.000.000
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Terselenggaranya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran</b>			1.719.185.513				3.162.000.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya materai, paket pengiriman surat dan BBM yang disediakan	Padang	12 bulan	40.000.000	PAD		12 bulan	40.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya pembayaran rekening listrik, telepon, air, faximile, internet	Padang	10 bulan	292.000.000	PAD		12 bulan	441.000.000
	Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor	Jumlah pembayaran honorarium jasa kebersihan, tenaga pengamanan dan sopir kantor	Padang	6 bulan (14 orang tenaga pengamanan; 10 orang tenaga sopir; 5 orang tenaga kebersihan)	635.271.768	PAD		13 bulan (14 orang tenaga pengamanan; 10 orang tenaga sopir; 5 orang tenaga kebersihan)	1.500.000.000
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Padang	12 bulan	50.204.452	PAD		12 bulan	70.000.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Padang	12 bulan	50.000.000	PAD		12 bulan	60.000.000
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen listrik/penerangan	Padang	10 komponen	7.469.293	PAD		10 komponen	17.000.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undang	Jumlah Media/surat kabar harian yang disediakan	Padang	12 bulan	24.240.000	PAD		12 bulan	34.000.000
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan dan minum kantor	Padang	12 bulan	40.000.000	PAD		12 bulan	60.000.000
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah dan keluar daerah	Jumlah pelaksanaan konsultasi dan koordinasi ke dalam dan luar daerah	Padang	40 kali	450.000.000	PAD		40 kali	750.000.000
	Penyediaan Jasa Informasi Dokumenter dan Publikasi	Terlaksananya penyediaan jasa dokumentasi dan publikasi	Padang	12 bulan	30.000.000	PAD		12 bulan	40.000.000
	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah kendaraan yang dialokasikan premi asuransinya	Padang	10 kendaraan roda empat, 2 unit bangunan, traktor	100.000.000	PAD		10 kendaraan roda empat, 2 unit bangunan, traktor	150.000.000
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Meningkatnya sarana dan prasarana</b>			1.788.755.904				2.345.000.000
	Pengadaan Meubeleur	Jumlah unit meubeleur yang diadakan	Padang	4 jenis				4 jenis	300.000.000
	Pengadaan kendaraan Dinas	-	Padang	-		0		-	500.000.000
	Pengadaan Komputer dan jaringan komputerisasi	Tersedianya PC, laptop/notebook, printer	Padang	10 jenis		PAD		10 jenis	

								250.000.000
Pengadaan Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi	Tersedianya alat-alat studio, komunikasi dan informasi	Padang	8 unit	160.000.000	PAD	8 unit		450.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya paket pemeliharaan gedung kantor (pengecatan gedung, taman, WC, kunci dan lantai)	Padang	1 paket	311.850.000	PAD	1 paket		300.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya suku cadang, pajak STNK	Padang	10 unit	250.000.000	PAD	10 unit		120.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya pemeliharaan AC, server, komputer, laptop, ups, printer, kamera digital, fax, telepon, mesin hitung, cctv,mesin absensi, smart tv	Padang	113 unit	99.000.000	PAD	113 unit		75.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala instalasi dan jaringan	Terlaksananya pemeliharaan isntalasi dan jaringan listrik, telp dan air	Padang	12 bulan	55.545.000	PAD	12 bulan		50.000.000
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Padang	11 jenis	35.650.000	PAD	11 jenis		300.000.000
Pembangunan Gedung Kantor	Terlaksananya pembangunan gedung kantor (Green house dan dapur kantor)	Padang	2 paket	70.000.000	PAD	2 paket		0
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Terlaksananya paket rehabilitas gedung kantor (Penambahan kanopi, rehap ruangan)	Padang	2 paket	166.955.000	PAD	2 paket		0
<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Terselenggaranya peningkatan disiplin aparatur</b>			<b>66.000.000</b>				<b>85.000.000</b>
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas pegawai	Padang	95 pegawai	66.000.000	PAD	95 pegawai		85.000.000
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur</b>	<b>Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur</b>			<b>145.280.585</b>				<b>150.000.000</b>
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah keikutsertaan aparatur dalam mengikuti bimtek implementasi peraturan Perundang-undangan	Padang	7 kali	145.280.585	PAD	7 kali		150.000.000
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian</b>	<b>Meningkatnya penyelenggaraan penatausahaan keuangan</b>			<b>430.092.758</b>				<b>635.000.000</b>
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar kerja DLH	Padang	9 dokumen	52.619.544	PAD	9 dokumen		80.000.000
Penata usahaanaan keuangan SKPD	Tertibnya administrasi keuangan SKPD	Padang	12 bulan	230.000.000	PAD	12 bulan		275.000.000
Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran DLH	Padang	8 dokumen	20.000.000	PAD	8 dokumen		30.000.000
Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD	Pembayaran Honor pengawasan dan pengendalian asset SKPD	Padang	12 bulan	67.380.456	PAD	12 bulan		100.000.000
Monitoring dan Evaluasi dan Kegiatan SKPD	Jumlah peserta Rakor PLH	Bukittinggi	67 Orang	60.092.758	PAD	67 Orang		150.000.000
	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan monitoring dan evaluasi		19 Kab/Kota			19 Kab/Kota		
<b>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</b>	<b>Terkendalinya sumber pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup</b>			<b>1.535.000.000</b>				<b>4.910.000.000</b>
Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran Media	Jumlah percontohan pemulihan pencemaran		1 klaster	210.000.000	PAD	1 klaster		275.000.000

Lingkungan Hidup							
Pemantauan kualitas media lingkungan dan sumber pencemaran	jumlah kualitas media lingkungan dan sumber pencemaran yang dipantau		6 media, 10 sumber pencemar	100.000.000	PAD	10 media, 30 kegiatan/usaha	350.000.000
Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan daerah (PROPERDA)	Jumlah objek kegiatan yang dinilai peringkat kinerja pengelolaan lingkungan hidupnya	17 kegiatan	100.000.000	PAD	25 kegiatan	225.000.000	
Pembinaan dan pengawasan pengelolaan limbah B3	Jumlah objek kegiatan yang dilakukan pembinaan dan pemantauan dalam pengelolaan LB3 (penghasil, pemanfaat, pengumpul, pengangkut, depo/centerpoint)	20 objek	100.000.000	PAD	45 objek dan 4 depo/centerpoint	225.000.000	
Pilot projek pengelolaan LB3	Jumlah dokumen lingkungan pengelolaan LB3 yang disusun, jumlah daerah yang membentuk center poin/depot, jumlah peserta FGD	-	-	PAD	2 dokumen (DED dan AMDAL)	-	
Peningkatan Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan (Adipura)	Jumlah kab/kota yang dibina dan dinilai	15 Kab/kota	150.000.000	PAD	14 Kab/kota	375.000.000	
	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	75 orang					
Penanggulangan dan pemulihan kerusakan LH	Jumlah dokumen kajian pemetaan sosial pilot project rencana pemulihan LAT yang disusun	1 dokumen	100.000.000	PAD	2 lokasi (sijunjung dan Dhamasraya)	120.000.000	
Pengawasan dan pengendalian sumber kerusakan LH	Jumlah sumber kerusakan lingkungan yang diidentifikasi kerusakannya dan ditindaklanjuti dengan upaya upaya pencegahan	25 objek	175.000.000	PAD	25 objek	220.000.000	
Pemantauan kualitas lahan dan biota Laut	Jumlah objek mangrove dan objek gambut yang dipantau	10 objek mangrove dan 10 objek gambut	100.000.000	PAD	8 objek	100.000.000	
Pembinaan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim (Program Kampung Iklim)	Jumlah Kab/Kota yang dibina dalam pelaksanaan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	19 Kab/Kota	170.000.000	PAD	19 Kab/Kota	200.000.000	
	Jumlah peserta sosialisasi program kampung iklim	60 orang			60 orang		
Pengadaan peralatan, Suporting laboratorium dan bahan Kimia	Jumlah Pengadaan peralatan, Supporting laboratorium dan bahan Kimia yang disediakan	5 jenis	10.000.000	PAD	1 paket	2.200.000.000	
Pengambilan dan pengujian parameter kualitas lingkungan dan sampel pengelolaan limbah	Jumlah sampel yang telah diuji	160 sampel	10.000.000	PAD	185 sampel	500.000.000	
Pengembangan UPTD Laboratorium	Terlaksananya Pengembangan UPTD laboratorium	1 UPTD	300.000.000	PAD	paket	120.000.000	
Kerjasama Sister Province Untuk Penerapan Teknologi dan Manajemen Pengelolaan Sampah	Terlaksananya pilot projek pengelolaan sampah pasar dan komersial; terlaksananya penerapan teknologi pengelolaan sampah TPS Payakumbuh dan Solok; terlaksananya pelatihan dan magang pengelolaan TPA dan Limbah Medis ke Jepang	2 lokasi; 2 TPA; 5 orang	10.000.000	PAD	-	0	
<b>Program Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan</b>	<b>Persentase ketataan pemilik usaha dan/atau kegiatan terhadap hukum lingkungan</b>		<b>335.000.000</b>			<b>1.235.000.000</b>	
Penyusunan peraturan perundang undangan bidang lingkungan hidup	Jumlah peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup yang disusun	4 Perda / Pergub / Kepgub	100.000.000	PAD	4 Perda / Pergub / Kepgub	275.000.000	
Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peraturan yang disosialisasikan	-	0	PAD	2 peraturan	200.000.000	
Pembinaan hukum dan perizinan lingkungan	Jumlah instansi lingkungan hidup dan pemilik usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pembinaan dan perizinan	7 kab/kota	225.000.000	PAD	8 kab/kota	260.000.000	

	jumlah pemilik usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pembinaan dan perizinan	10 objek				15 objek	
	Jumlah objek yang dilakukan pembinaan wasdal pengelolaan lingkungan	20 objek					
Penaatan hukum lingkungan	Jumlah objek usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan penegakan hukum lingkungan dan monev gakkum (sanksi administrasi, perdata, pidana)	11 objek	10.000.000	PAD	7 kasus (2 gakum, 5 monev)	250.000.000	
	Jumlah kasus lingkungan hidup yang dapat difasilitasi penyelesaiannya	7 kasus			7 kasus	250.000.000	
<b>Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan</b>	<b>Percentase penurunan volume sampah melalui implementasi 3R</b>	<b>%</b>	<b>1.161.979.240</b>			<b>%</b>	<b>1.390.000.000</b>
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah	Jumlah kegiatan / kelompok masyarakat yang difasilitasi dalam mengaplikasikan 3R sampah	2 kelompok (TPA Solok dan pasar Padang)	700.000.000	PAD	2 kelompok (TPA Solok dan pasar Padang)	375.000.000	
Pembinaan pengelolaan sampah kab/kota	Jumlah kabupaten/kota yang dibina dalam pengelolaan persampahan; jumlah peserta yang mengikuti Bimtek	19 kab/kota; 50 orang	182.000.000	PAD	19 kab/kota	275.000.000	
Peningkatan Implementasi Gerakan Sumbar Bersih	Jumlah kecamatan/kelurahan yang dibina dan dinilai; jumlah peserta sosialisasi	26 kec/kel; 45 orang	250.000.000	PAD	26 kec/kel	500.000.000	
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	Jumlah kab/kota yang dimonitoring/dievaluasi pelaksanaan PPSP	9 kab/kota	29.979.240	PAD	19 kab/kota	120.000.000	
Pelatihan pengelolaan sampah 3R untuk sektor informal di TPA Regional	-	-	0	PAD	60 orang	120.000.000	
<b>Program Tata Lingkungan, Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam</b>	<b>1) Percentase kecukupan instrumen penataan lingkungan di Sumbar 2) Percentase pemanfaatan instrumen penataan lingkungan 3) Percentase peningkatan upaya-upaya pemeliharaan lingkungan yang sesuai kriteria</b>		<b>460.000.000</b>				<b>1.230.000.000</b>
Valuasi ekonomi lingkungan melalui Insentif, disincentif dan pendanaan lingkungan	Jumlah instrumen valuasi ekonomi lingkungan (insentif, disincentif dan pendanaan lingkungan) yang disusun	1 dokumen	150.000.000	PAD	1 dokumen	275.000.000	
Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Penatalaksanaan Penilaian/Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup	Jumlah kab/kota yang dievaluasi kinerja penatalaksanaan penilaian dokumen Amdal atau pemeriksaan UKL-UPL nya	19 kab/kota		PAD	15 kab/kota		
	Jumlah peserta sosialisasi/bimtek terkait dokumen lingkungan	75 orang			75 orang		
Pembinaan KLHS, RPPLH, daya dukung Terhadap Dokumen Perencanaan	Jumlah kab/kota yang dibina dalam pelaksanaan KLHS terhadap dokumen perencanaannya; jumlah peserta sosialisasi Perda RPPLH prov. Sumbar	19 Kab/kota; 60 orang	280.000.000	PAD	10 Kab/kota	150.000.000	
	Jumlah peserta klinik asistensi penyusunan KLHS Kabupaten Kota	100 orang			100 orang	120.000.000	
Pemeliharaan Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati	Rencana Induk Pengelolaan (RIP) Kehati	1 dokumen	10.000.000	PAD	1 dokumen	285.000.000	

	jumlah kawasan yang dipetakan potensinya	6 kawasan			3 lokasi	
	jumlah taman kehati yang dibina	4 taman kehati				
	jumlah peserta Bimtek	50 orang				
Perlindungan atmosfir dari perusak ozon (BPO) dan emisi gas rumah kaca (GRK)	Jumlah Kab/kota yang diidentifikasi pemakaian bahan perusak ozon dan emisi gas rumah kaca (GRK)	19 kab/kota	10.000.000	PAD	19 kab/kota	175.000.000
Penyusunan dokumen Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) Laut	Jumlah Dokumen Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) Laut	1 Dokumen	10.000.000	PAD	1 Dokumen	225.000.000
Penyusunan dokumen lingkungan TPA Regional Payakumbuh	Jumlah paket dokumen lingkungan yang disusun	-	0	PAD	1 paket	0
<b>Program Peningkatan Kualitas Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</b>	<b>Percentase peningkatan jumlah masyarakat/kelompok masyarakat / lembaga yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan</b>		<b>620.000.000</b>			<b>1.875.000.000</b>
Pembinaan dan Penilaian Peranserta Masyarakat dan Kelompok Peduli Lingkungan Hidup (Kalpataru)	Jumlah calon yang dibina untuk diusulkan sebagai calon penerima kalpataru	8 orang / kolompok	100.000.000	PAD	10 orang / kolompok	125.000.000
Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD)	Jumlah buku DIKPLHD Prov. Sumbar yang dicetak	40 buku	275.000.000	PAD	40 buku	300.000.000
	Jumlah dokumen data DIKPLHD 2020	1 draft				
GEPULING (Gerakan Penyuluhan Lingkungan)	Jumlah penyuluhan multi sektor yang ditingkatkan wawasan lingkungannya dan diberdayakan dalam penyebarluasan informasi lingkungan hidup	50 orang	100.000.000	PAD	50 orang	150.000.000
	Fasilitasi penerapan gepuling	2 kab/kota			2 kab/kota	
Peningkatan kapasitas lembaga pendidikan dasar dan menengah dalam pelestarian lingkungan hidup	Jumlah sekolah yang dibina dan dinilai dalam program Adiwiyata	100 sekolah	10.000.000	PAD	100 sekolah	950.000.000
	Jumlah peserta Bimtek tim Adiwiyata	100 orang				
	Jumlah peserta sosialisasi adiwiyata untuk SLTA se Sumatera Barat	150 orang				
Koordinasi Pengelolaan Inovasi Lingkungan	Jumlah inovasi lingkungan yang dikoordinasikan dan ditindaklanjuti	10 inovasi	35.000.000	PAD	10 inovasi	50.000.000
Peningkatan edukasi dan kampanye masyarakat di bidang lingkungan	jumlah rangkaian acara edukasi dan kampanye lingkungan hidup	3 iven	100.000.000	PAD	3 iven	300.000.000
<b>Program Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional</b>	<b>Meningkatkan pengelolaan TPA Sampah Regional</b>		<b>3.168.000.000</b>			<b>33.700.000.000</b>
Pemantauan kualitas lingkungan kawasan TPA Sampah Regional	Jumlah laporan kawasan lingkungan TPA Sampah Regional yang dipantau	4 Laporan	68.000.000	PAD	4 Laporan	200.000.000
Peningkatan pembangunan Infrastruktur TPA Regional	Tersedianya infrastruktur di TPA Sampah Regional	2 lokasi	0	PAD	2 lokasi	1.500.000.000
Pengendalian dan operasional UPTD TPA Sampah Regional	Terlaksananya operasional TPA	2 TPA	3.090.000.000	PAD	2 TPA	4.500.000.000
Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung TPA Sampah Regional	Terlaksananya pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung TPA Sampah	2 TPA	10.000.000	PAD	2 TPA	2.500.000.000

	Regional							
Pembebasan tanah untuk pengembangan TPA Regional Payakumbuh	Luas tanah yang dibebaskan		19.500 m2	0	PAD		19.500 m2	0
Pengadaan teknologi Gasifikasi	Jumlah pengadaan teknologi gasifikasi		1 paket	0	PAD		1 paket	25.000.000.000

Rencana Kerja Organiasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 merupakan penjabaran Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 - 2021 dan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat 2005-2025.

RENJA-OPD Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 merupakan pedoman/acuan bagi unit kerja lingkup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Setiap pelaksana kegiatan pada bidang-bidang dan sekretariat pada OPD Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat berkewajiban untuk melaksanakan program/kegiatan pembangunan lingkungan hidup 2020 dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kaidah dan peraturan yang berlaku serta mempedomani arahan perencanaan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
2. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat berkewajiban untuk melaksanakan RENJA-OPD ini sesuai dengan yang termuat di dalam visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pokok pembangunan lingkungan hidup Provinsi Sumatera Barat.
3. Organiasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Lingkungan Hidup berkewajiban menjamin konsistensi antara rancangan RPJM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2020 dengan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 – 2021.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan RENJA-OPD Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 Kepala Organiasi Perangkat Daerah (OPD) berkewajiban untuk melakukan pemantauan pelaksanaannya.